



Implementasi Pembinaan dan Pengawasan untuk Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Industri Kecil Menengah di Kota Surabaya

Shella Alfiani Nafisa¹, Nurjanti Takarini²

^{1,2}Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, 60294

E-mail:* 22012010049@student.upnjatim.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2140>

Info Artikel:

Diterima :
2024-11-26

Diperbaiki :
2024-12-13

Disetujui :
2024-12-13

Kata Kunci: Pembinaan,
Pengawasan, IKM, Industri,
Efektivitas

Abstrak Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu program kerja bidang industri yang mencakup informasi mengenai evaluasi, catatan kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan bagi industri yang telah dibina atau diawasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas dalam penerapan program pembinaan dan pengawasan pada Industri Kecil Menengah di Kota Surabaya. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa program mempunyai efektivitas dalam meningkatkan pemahaman IKM terkait perizinan usaha dan standar industri. Namun, terdapat juga hambatan dari pihak penyelenggara berupa keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan kesepahaman pada pihak penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya upaya sinergis antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pelaku IKM untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan untuk lebih meningkatkan minat IKM dalam mematuhi segala regulasi yang ada.

Abstract: Coaching and supervision is one of the industrial work programs that includes information on evaluation, compliance records, and recommendations for improvement for industries that have been coached or supervised. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the implementation of the coaching and supervision program in Small and Medium Industries in Surabaya City. Data were analyzed using qualitative methods and descriptive approaches using interview techniques. The results of the interviews revealed that the program was effective in increasing SME understanding

regarding business licensing and industry standards. However, there were also obstacles from the organizers in the form of limited human resources and differences of understanding among the beneficiaries. The results of the study indicate that synergistic efforts are needed between the Department of Industry and Manpower and SME actors to increase the effectiveness of the coaching and supervision program to further increase SME interest in complying with all existing regulations.

Keywords: *Coaching, Supervision, SMEs, Industry, Effectiveness*

Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mendalami bagaimana suatu individu, rumah tangga, perusahaan dan pemerintah menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi disetiap negara akan berbeda karena masing-masing mempunyai sifat khas atau unik yang selalu di upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Hadi, 2018). Peran ekonomi juga hampir mempengaruhi semua segmen dari kebutuhan dasar hingga keputusan besar dalam kehidupan manusia.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi seperti penambahan produksi barang dan jasa di berbagai sektor industri. Pelaksanaan pertumbuhan ekonomi juga gencar dilaksanakan di Indonesia dengan berbagai pembangunan yang terencana dan bertahap serta fokus pada upaya pemerataan pembangunan, (Munif, 2015). Melalui pembangunan secara nasional diupayakan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi seluruh masyarakat. Pada programnya, pemerintah juga memfokuskan pengembangan ekonomi di seluruh daerah khususnya di wilayah Surabaya pada tingkat lokal seperti Industri Kecil Menengah dengan terus mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Wilayah Surabaya merupakan salah satu kota terbesar sebagai pusat perekonomian di wilayah Jawa Timur dengan berbagai jenis sektor. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menempati posisi teratas pertumbuhan ekonomi kecuali saat mengalami krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan saat terjadinya Pandemi Covid-19 tahun 2020 (Veriyanto & Yasin, 2023). Sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri yang strategis meliputi manufaktur, logistik, dan perdagangan membuat Surabaya unggul dalam mendorong kegiatan perekonomian regional dan nasional.

Salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam penggerak utama ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal pada tahun 2022 adalah sektor industri yang meliputi Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kontruksi, serta Informasi dan Komunikasi.

Perkembangan sektor industri Surabaya yang pesat ini juga melibatkan pemerintah kota yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui bidang industri untuk mendukung perkembangan industri di kota Surabaya. Pemantauan perkembangan industri dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan cara mengawasi, membina, dan memastikan kepatuhan para pelaku industri terhadap standar yang berlaku. Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor industri yang menyerap tenaga kerja yang tinggi dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Tasya (2021), hasil produk sektor industri selalu mempunyai nilai tambah yang lebih besar daripada produk sektor lain karena variasi produk yang beragam dapat memberikan nilai guna yang tinggi.

Tabel. 1 Jumlah Perusahaan Industri Terbanyak Berdasarkan KBLI Pada SIINAS Tahun 2023

No	KBLI	Jumlah Perusahaan
1	10710-Industri Produk Roti dan Kue	10.049
2	10794-Industri Kerupuk, Keripk, Peyek, dan sejenisnya	9.207
3	10792-Aneka Kue Basah	3.946
4	10750-Makanan	3.716
5	14111-Garment	3.018

Pada tabel 1 merupakan data perusahaan industri yang paling banyak menurut KBLI berdasarkan informasi dari SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). KBLI paling banyak pertama adalah Industri Produk Roti dan Kue dengan nomer KBLI 10710 sebanyak 10.049 klasifikasi jenis dari perusahaan. Pengelompokan jenis usaha berdasarkan nomer KBLI ini dimaksudkan untuk mempermudah klasifikasi lapangan usaha dan mempermudah menentukan perizinan usaha yang dibutuhkan. Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mendorong pemerintah untuk mengarahkan setiap IKM mengikuti regulasi dan arahan yang tepat.

Mengingat betapa pentingnya peran industri kecil menengah tentunya menjadi fokus penting Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk selalu mengoptimalkan para pelaku industri. Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu program kerja bidang industri yang mencakup informasi mengenai evaluasi, catatan kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan bagi industri yang telah dibina atau diawasi. Pemberian arahan dan juga dukungan untuk pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan standar IKM supaya lebih berkualitas merupakan tujuan dari pembinaan. Sementara itu bentuk kepatuhan dari pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah masuk ke dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memelihara pelaku usaha berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Bentuk kepatuhan yang diawasi berupa standar keselamatan, izin berusaha dan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan serta tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat atau lingkungan. Tujuan utama dari pembinaan dan pengawasan untuk menjaga batasan supaya tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan, (Akbar et al., 2021).

Ditengah situasi pesatnya pertumbuhan industri tentu menciptakan dinamika yang kompleks seperti menciptakan berbagai tantangan baik dari segi regulasi, teknologi, ataupun dari sumber daya manusianya. Khususnya dari segi regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki kelengkapan dokumen untuk pengurusan izin berusaha yang menjadi persoalan yang rumit karena kurangnya tingkat kesadaran dari pelaku usaha, (Yuanitasari et al., 2023). Didapati pelaku usaha yang kurang memiliki minat untuk mendaftarkan usahanya kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun diadakan pembinaan karena ketidakselarasan tujuan mereka dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, (Tafrilyanto et al., 2023).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan pada Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di Surabaya dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Mengkaji bagaimana dampak implementasi program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bidang industri meningkatkan pengetahuan dan efektivitas programnya pada pelaku IKM walaupun mendapati rintangan yang ditemui selama berada di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya di Jalan Penjaringan Asri No. 36, Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sekaligus kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan rintangan yang muncul dari kedua faktor

yaitu pelaku usaha atau IKM dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rintangan yang dihadapi serta meningkatkan pengetahuan IKM untuk mencapai efektivitas program pembinaan dan pengawasan.

Metode

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang akan berfokus pada implementasi pembinaan dan pengawasan Industri Kecil Menengah serta rintangan selama pelaksanaan program. Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data secara mendalam serta mendeskripsikan bagaimana situasi di lapangan secara terperinci, (Dwiyanto, 2021). Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini merupakan pengolahan data dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang yang tidak secara langsung mengalaminya. Jadi penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu pendekatan terhadap fenomena atau permasalahan tertentu yang menjadi subjek penelitian dan selanjutnya hasil temuan dideskripsikan menjadi susunan kalimat yang memaparkan pemahaman tertentu.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya sebagai pelaksana program dan pelaku usaha Industri Kecil Menengah sebagai subjek penerima program pembinaan dan pengawasan. Menurut Fadhallah (2021), wawancara merupakan sebuah komunikasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang menjadi interviewer dan interviewee untuk tujuan mendapatkan sejumlah informasi atau jawaban. Teknik wawancara menurut memberikan keuntungan bagi interviewer mendapatkan informasi yang akurat karena peserta wawancara dapat memberikan informasi yang terstruktur sehingga meminimalkan variasi dalam jawaban, (Marannu et al., 2024).



Gambar 1. Proses Penelitian Kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara didapatkan berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program, baik dari segi pelaksanaan selama program berjalan untuk mencapai segi efektivitas pembinaan dan pengawasan yang diharapkan.

Segi Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan, IKM atau pegawai internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengalami sejumlah hambatan yang menghambat kelancaran proses. Melalui proses wawancara dengan pihak internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta pelaku usaha yang pernah terlibat dalam program bimbingan teknis, didapati bahwa banyak pelaku usaha IKM yang masih belum memahami pentingnya mendaftarkan usaha mereka dengan mempunyai perizinan berusaha. Seperti yang telah tertulis di Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Para pelaku usaha dibina untuk melakukan pendaftaran berusaha melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi.

1. Pihak Internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada pelaksanaannya sejumlah rintangan dihadapi oleh pihak internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada bidang Industri. Menurut Straub dan Attner dalam Utama (2020) sumber daya yang paling penting sebagai penggerak utama dalam organisasi adalah manusia. Sumber daya manusia yang terbatas ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah IKM, menurut hasil wawancara dengan pihak internal minimal ada sebanyak 14.000 IKM berdasarkan perizinan yang ada di Surabaya. Jumlah IKM yang sangat besar membuat program pembinaan dan pengawasan tidak bisa optimal secara menyeluruh. Pembekalan yang menyangkut dengan regulasi industri juga belum ditingkatkan secara maksimal.

Tabel. 2 Monev Pembinaan dan Pengawasan

No	Bulan	Target Pembinaan	Target Pengawasan
1	Januari	25	26
2	Februari	30	30
3	Maret	30	30
4	April	40	30
5	Mei	60	36
6	Juni	70	40
7	Juli	70	40
8	Agustus	60	30
9	September	70	45
10	Oktober	70	45
11	November	50	30
12	Desember	17	18

Pada tabel 2 menunjukkan monev pada tahun 2024 yang memperlihatkan bahwa target pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan belum mencakup 14.000 IKM yang tersebar di Kota Surabaya. Sumber daya manusia yang terbatas dalam pelaksanaan program, terutama dari tim pembinaan dan pengawasan yang turun langsung ke lapangan membuat tim harus membuat strategi dalam penjadwalan pembinaan dan pengawasan setiap harinya. Sumber daya manusia yang telah disesuaikan dengan porsinya maka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap hasil kinerja yang positif, (Utaminingsih et al., 2024) . Dengan kondisi ini maka akan menyulitkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memberikan pendampingan yang merata pada seluruh pelaku IKM. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pendampingan langsung serta minimnya pemantauan terhadap perkembangan IKM yang tersebar di berbagai wilayah.

2. Pihak Internal IKM

Selanjutnya, rintangan selama masa pelaksanaan berasal dari internal masing-masing IKM yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan. Ketidakselarasan harapan dan pemahaman antara pihak penyelenggara dan IKM membuat implementasi program tidak berjalan secara efektif terutama dalam hal kerjasama dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kerjasama yang digalakkan adalah membangun kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil. Kerjasama ini tidak menciptakan titik temu kesepakatan karena pelaku IKM merasa

kesulitan dalam memenuhi target yang tinggi terkait penyediaan bahan baku atau barang setengah jadi ke perusahaan besar. Perkara ini disebabkan adanya keterbatasan kapasitas produksi atau pola kerja yang kurang terstruktur sehingga menyebabkan IKM sulit beradaptasi dengan pola kerja yang lebih teratur dan berbasis target. Minimnya informasi terkait alur pendaftaran usaha juga menjadi semakin kompleks terutama pada pelaku usaha kecil yang dikelola oleh pelaku usaha yang tergolong kurang paham teknologi.

Hambatan lainnya adalah tidak adanya pembaruan data untuk informasi usaha yang dilakukan oleh pelaku IKM. Pada pengawasan, pembaruan data untuk informasi usaha sangat penting karena kebutuhan data yang akurat dan terbaru menjadi fondasi bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memantau perkembangan usaha. Namun realitasnya, pelaku usaha tidak melakukan pembaruan data sehingga menyebabkan ketidaksesuaian informasi seperti perubahan lokasi usaha, jenis produksi, atau status operasional IKM. Miskomunikasi antara pelaku IKM dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait pembaruan data ini akan menjadi hambatan jika pelaku usaha tidak menjalankan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Segi Efektivitas

Disamping rintangan yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan, terdapat segi efektivitas yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Fokus utama dari program pembinaan dan pengawasan yaitu pada pengawasan fokus tertuju pada capaian untuk membuat pelaku usaha dapat tertib terkait perizinan usaha. Perizinan dapat memperkecil kendala yang muncul selama kegiatan ekonomi berlangsung dan merupakan strategi pemerintah untuk mengendalikan kehidupan ekonomi sosial, (Amir et al., (2021). Pada dasarnya tujuan perizinan juga menjadi fungsi yang mutlak mendapatkan perlindungan hukum bagi pelaksanaan suatu kegiatan dengan komitmen yang harus selalu dipenuhi, (Yudani & Subekti, 2022) . Setiap perizinan mempunyai ketentuan yang berbeda berdasarkan tingkat resiko usaha. Usaha yang mempunyai resiko rendah maka yang dibutuhkan hanya NIB (Nomer Induk Berusaha). Kemudian resiko menengah rendah yang dibutuhkan berupa NIB dan sertifikat standar tanpa perlu verifikasi. Selanjutnya resiko menengah tinggi persyaratan berupa NIB dan sertifikat standar dengan verifikasi. Usaha dengan resiko tinggi mempunyai persyaratan NIB, sertifikat standar dan surat izin yang berkenaan dengan kegiatan berusaha.



Gambar 2. Bimbingan Teknis di Kampung Dandang Kelurahan Jepara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Program pembinaan dan pengawasan telah melakukan bimbingan teknis di berbagai lokasi industri di Surabaya untuk memberikan pelatihan pembuatan Nomer Induk Berusaha, salah satunya di Kampung Dandang yang berada di Jalan Dupak Magersari No.86 RT.001/RW. 009, Kel. Jepara, Kec. Bubutan. Pada kampung ini, warga pemilik usaha memiliki keterampilan dalam membuat berbagai macam jenis dandang yaitu, dandang soto, dandang nasi, dandang es krim dan berbagai jenis dandang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Joenaidy (2019), bimbingan teknis dilakukan secara tatap muka karena sifatnya yang praktis dan memandu pelaku usaha dalam memahami praktik nyata dalam meningkatkan pemahaman mereka secara langsung.



Gambar 3. Pendaftaran Nomer Induk Berusaha

Pelaku usaha yang berjumlah 9 orang pelaku usaha dandang dibina dengan memberikan materi mengenai cara pembuatan NIB atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Untuk mendapatkan NIB pelaku usaha dandang harus mengisi sejumlah persyaratan data seperti Identitas Pribadi, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Kekayaan, Modal, Omzet, serta sarana dan prasarana yang digunakan selama usaha berjalan. Selanjutnya, pelaku usaha yang telah memiliki NIB akan difasilitasi pembuatan merk dagang dengan mengadakan bimbingan teknis kembali. Kemudian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memfasilitasi pendaftaran produk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Segala fasilitas yang disediakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dandang untuk mendaftarkan usaha mereka guna meningkatkan kelas usaha mereka menjadi lebih baik. Langkah meningkatkan kelas usaha ini dilakukan dengan cara strategi kemitraan untuk menjadikan yang semula skala usahanya kecil menjadi menengah. Kemitraan ini memungkinkan para pelaku usaha kecil dapat berkolaborasi dengan pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, ekosistem usaha berkualitas dan berkelanjutan dapat terbentuk untuk mendukung peningkatan skala bisnis pelaku usaha.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan dan pengawasan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak penyelenggara dan penerima manfaat yang menjadi rintangan besar selama program berjalan seperti keterbatasan sumber daya manusia pada pihak penyelenggara dan perbedaan kesepahaman pada pihak penerima manfaat. Namun, program yang berjalan telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pelaku IKM. Program yang cemerlang ini dapat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peluang usaha melalui pelatihan teknis, pendaftaran usaha untuk mendapatkan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan jalinan yang erat dengan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk menjalankan program pembinaan dan pengawasan diperlukan upaya sinergis antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pelaku IKM untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat lebih meningkatkan kampanye manfaat pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan minat pelaku IKM melalui kampanye tersusun secara berkelanjutan. Selain itu, pelaku IKM juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam pemenuhan syarat administrasi untuk meningkatkan kapasitas teknis mereka. Dengan adanya perbaikan dari kedua belah pihak, diharapkan program ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi IKM di Kota Surabaya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur dan Program Magang MBKM PKK M atas kesempatan mengikuti magang selama empat bulan ini di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku dosen pembimbing, orang tua, teman-teman dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan artikel ini di masa mendatang.

Referensi

- Akbar, B. A. P., Magfuri, I. M., & Apriliasari, D. (2021). Pelatihan Kewirausahaan di Kampung Literasi Berdaya Saing Menuju Revolusi Industri 4.0. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.34306/adimas.v2i1.523>
- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2021). IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IMPLICATIONS ARISING IN THE EASE OF ISSUING BUSINESS LICENSES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 OF 2021 ABOUT RISK-B. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 8–24.
- Baso Marannu, Nur Fadhillah Mappaseleng, N. S. M. (2024). *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (1st ed.). Jejak Pustaka.
- Chairul Fajar Tafrilyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>
- Dwiyanto, D. (2021). *Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian*. 0, 1–7.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara* (1st ed.). UNJ PRESS.
- Hadi, N. (2018). PARADIGMA IDIOLOGI SISTEM EKONOMI DUNIA. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 97. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.4769>
- Joenaiddy, A. M. (2019). *Konsep dan Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0* (1st ed.). Laksana.
- Muhammad Afrizal, Maulana Iman Jaya, Shella Rachmawaty, Estiningsih Tri Handayani, Ersam Mahendrawan, Saiful Anwar, S. U. (2024). *TINJAUAN TEORI PRAKTIS PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA* (1st ed.). PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Munif, N. A. (2015). SISTEM EKONOMI ISLAM: Dialektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.319-348>
- Raydhiani Tasya, Hanny Purnamasari, S.Sos, M.AP, Rachmat Ramdani, S.IP, M. I. P. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL*

MENENGAH (IKM) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BEKASI.
JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME, 7.

Salsabilla Saifana Veriyanto, & Muhammad Yasin. (2023). Sektor Industri Pada Pemetakan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.862>

Utama, Z. M. (2020). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Konsep Dasar dan Teori* (1st ed.). UNJ PRESS.

Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>

Yudani, W. S., & Subekti, R. (2022). Jurnal Discretie : Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukoharjo Abstract Jurnal Discretie : Kabupaten Sukoharjo yakni Dinas Penanaman Mo. *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 2(3), 121–130.